

MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI GAYUNGAN II/423 SURABAYA

Gayuh Ayibah

Shelly Andari, S.Pd., M.Pd

Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
gayuh.18057@mhs.unesa.ac.id

Abstrak: Tujuan penulisan dilakukan adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana perencanaan manajemen sarana dan prasarana Sekolah Inklusi di SD Negeri Gayungan II Surabaya, Rancangan penelitian menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara semi struktur, observasi langsung dan studi dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, mendeskripsikan dan memverifikasi data. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu validitas konstruk, validitas internal, validitas eksternal serta keandalan. Hasil penelitian yang diperoleh ialah 1) Perencanaan sarana dan prasarana sekolah inklusi di SD Negeri Gayungan II Surabaya dilaksanakan dengan kaidah kaidah manajemen dan peraturan perundang – undangan yang ada.2) Implementasi sarana dan prasarana SD Negeri Gayungan II Surabaya dalam melaksanakan pembagian tugas, tanggungjawab sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sumberdaya manusia yang sesuai, dana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berasal dari dana BOS, BOPDA serta sumbangan komite.

Kata kunci : manajemen, sarana dan prasarana, sekolah inklusi

Abstract: Find out, analyze and describe how planning, implementation dan evaluating inclusive school facilities and infrastucture in public elementary school Gayungan II/423 Surabaya is the purpose of this study. Research design used is study case. Data collection techniques are using semi-structure interview, direct observation and document studies. Steps in data analysis: First, data condentation. Second, the data display. Third, conclusions are taken and verification. Test for validity used is construct validity, internal validity, external validity and reliability. The results of this studies show that. First, planning of inclusion schools in public elementary school Gayungan II/423 Surabaya is carried out with management rules and laws and regulations. Second, implementation of facilities and infrastucture in public elementary school Gayungan II/423 Surabaya in carriying out the devision of tasks, responsibilities according to the appropriate capacity of human resource, funds fo the procurement and maintenance of facilities and infrastucture come from BOS, BOPDA adn commite contributions.

Keywords : management, facilities and infrastructure, inclusive schools

PENDAHULUAN

Strategi pemerintah dalam pemerataan pendidikan Indonesia sudah dimulai sejak dikukuhkan dalam naskah UUD 1945 pasal 31 ayat (2) yang berbunyi “ Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya”. Implementasi pendidikan dasar harus ramah terhadap semua warga negara tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Pendidikan dasar anak berkebutuhan khusus di Indonesia digolongkan menjadi 3 jenis lembaga pendidikan yaitu SLB (Sekolah Luar Biasa), SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) dan Sekolah

Inklusi. SLB biasanya hanya menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan kesamaan kebutuhan, misalnya SLB Tuna Netra yang hanya menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus mata. SDLB merupakan sekolah dasar yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan berbagai kebutuhan, SDLB menerima peserta didik dengan semua karakteristik anak berkebutuhan khusus miliki. Sedangkan sekolah inklusi merupakan sekolah yang menerima peserta didik secara umum dan berkebutuhan khusus dalam kelas yang sama. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia telah

dikoordinasikan hingga ketataran pemerintah daerah dengan menargetkan setiap kecamatan dapat melaksanakan pendidikan inklusi pada tiap jenjangnya. Sekolah inklusi diharapkan mampu menjadi jawaban atas permasalahan fasilitas anak penyandang disabilitas dengan kesempatan bersekolah bersama peserta didik reguler dengan pelayanan yang sama sehingga mendapatkan simulasi kehidupan sosial masyarakat. *Output* yang dihasilkan diharapkan peserta didik mampu bersosial tanpa segmentasi atau deskriminasi tertentu.

Stigma mengenai anak berkebutuhan khusus yang tidak mampu terjun pada lingkungan sosialnya sebagai mana hakekat manusia menjadi problematika, diharapkan dengan pendidikan dasar inklusi wawasan peserta didik terhadap teman sebaya yang memiliki kebutuhan khusus menjadi terbuka, sehingga memunculkan toleransi terhadap sesamanya. Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kecerdasan sosialnya. Hal tersebut karena sekolah merupakan simulasi lingkungan sosial diluar keluarganya. Menuntut peserta didik mengenal, memahami dan berinteraksi dengan lingkungan sosial tersebut.

Tonggak sejarah penerapan pendidikan inklusi didunia bermula pada Juni tahun 1994 di Salamanca, Spanyol. Saat itu dibentuk sebuah konferensi dunia tentang Pendidikan Berkebutuhan Khusus atau sering disebut *Salamanca Declaration*. Pada konferensi yang diwakili 92 delegasi negara; UNESCO; organisasi non pemerintah yang peduli dengan pendidikan berkomitmen memotori sistem pendidikan inklusi supaya berkembang diseluruh dunia ("The Salamanca Statement and Framework For Action On Special Needs Education," 1994). Pendidikan inklusi merupakan sistem pembelajaran dimana anak berkebutuhan khusus berada dalam satu kelas yang sama bersama anak reguler dengan fasilitas layanan dan komponen yang mumpuni guna mendukungnya dalam proses pembelajaran. Dalam pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan perlakuan istimewa, melainkan hak dan kewajiban seperti anak lainnya. Pendidikan inklusi merupakan upaya dari pemerintah dalam pemerataan pendidikan yang tidak mengedepankan sisi kekurangan dari anak berkebutuhan khusus, melainkan memberikan kesetaraan dengan tujuan tidak terjadi diskriminasi hak-hak dari setiap warga negara. Kualitas fasilitas yang mendukung

pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus menjadi faktor kunci meningkatkan pembelajaran.

Pentingnya peranan sarana dan prasarana pendidikan inklusi dijelaskan dalam konvensi yang diselenggarakan PBB ("Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)," 2006) dalam arsip dokumen pasal 9 mengenai Aksesibilitas menyebutkan untuk memungkinkan penyandang disabilitas hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan maka negara harus semaksimal mungkin menghapuskan hambatan aksesibilitas antara lain dengan memfasilitasi sarana dan prasarana salah satunya pada sekolah. Pada penelitian lain juga disebutkan betapa pentingnya lingkungan fisik terhadap implementasi pendidikan inklusi(Ackah-jnr & Danso, 2018). Lingkungan fisik dapat diartikan segala benda disekolah yang dapat dilihat secara nyata dan dapat disentuh oleh peserta didik serta menunjang kegiatan belajar. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2013 pasal 1 angka 4 merinci pengertian standar sarana dan prasarana yang menetapkan kriteria prasarana meliputi ruang kelas, sarana olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, taman bermain, tempat rekreasi, serta sumber belajar lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Saat pandemi covid – 19 ini tidak hanya sarana fisik yang dapat dirasakan peserta didik. Paradigma baru menuju era 5.0 telah berkembang, yang mana sarana yang diperoleh peserta didik yakni sistem dalam jaringan yang mumpuni untuk memenuhi kegiatan belajar. Pendidikan inklusi di Indonesia memang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dilihat dari standar pendidikan yang memperhatikan manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana yang menjadi salah satu standar pendidikan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana yang puni dan ramah atas kebutuhan, keunikan peserta didik menjadi indikasi bahwa pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana disekolah tersebut baik.

Pemahaman masyarakat luas mengenai anak berkebutuhan khusus sebagian besar hanya sebatas anak dengan kecacatan sejak lahir, seperti tunanetra, tunawicara, tunarungu, tunalaras, autisme dan tunadaksa. Anak – anak dengan kesulitan belajar, gangguan motorik atau anak - anak korban penyalahgunaan narkoba dan kebutuhan lain cenderung diamati sebagai anak reguler. Pentingnya

pemahaman terhadap anak – anak berkebutuhan khusus sehingga mampu memberi fasilitas sesuai dengan kebutuhannya akan berdampak baik bagi perkembangannya.

Kegiatan penelitian manajemen sarana dan prasarana lebih banyak dipengaruhi dan dilakukan pada organisasi profit. Namun seiring perkembangan zaman penelitian pada organisasi non profit juga terus berkembang pesat, salah satunya bidang pendidikan. Ketepatan pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana sekolah menjadi jembatan yang dapat mengantar sekolah pada tujuan pelaksanaan pendidikan. Dengan adanya pemahaman pendidikan inklusi dan tekanan dunia seperti yang terdapat dalam SDG's (Indonesia, n.d.) pada tujuan keempat yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara. Kesadaran sosial akibat dampak buruk eksklusif memeberikan tekanan bahwa penyelenggaraan kesetaraan dengan hak dan tanggung jawab yang sama tiap individu dalam hal ini pendidikan menjadikan perubahan paradigma pendidikan dunia yang telah bersepakat menganai pendidikan inklusi perlu dijalkannya manajemen sarana dan prasarana untuk menghasilkan *out – put* dengan daya saing tinggi yang mampu menjawab tantangan global.

Menilik data yang diperoleh Balitbang Kemenkes RI bidang Puslitbang laboratorium ABK menganai jumlah ABK dan layanan ABK di Surabaya (Surabaya, 2017) rata - rata tidak seimbang. Mengamati dari website Kemenkes (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017) daerah dengan jumlah ABK tertinggi yaitu kecamatan Wonokromo namun layanan bagi ABK tertinggi terletak di kecamatan Tegalsari, pendataan kali ini membuka mata kita bahwa terjadi kesenjangan antara kebutuhan dengan fasilitas yang tersedia. Data tahun 2017 harus diperbarui karena sudah terjadi perubahan signifikan. Sebut saja kecamatan Gayungan yang sudah terdapat sekolah inklusi yakni SD Negeri Gayungan II yang menyediakan pelayanan pendidikan bagi ABK.

SD Negeri Gayungan II/423 terletak di Jl. Gayungan VII/ 17 – 21 Surabaya Kecamatan Gayungan, Surabaya. Sekolah memiliki 11 ruang kelas, 3 ruang layanan khusus, serta yang paling unik yakni terdapat ruang terapi (inklusi). Menunjang proses pendidikan inklusi, terdapat guru pendamping khusus untuk pendampingan guru kelas dalam mengelola pembelajaran. Setiap jenjang kelas terbagi

menjadi 2 rombongan belajar yang tiap kelas memiliki peserta didik disabilitas.

Pada studi pendahuluan orangtua peserta didik memberikan respon positif terhadap pelaksanaan pendidikan di SD Negeri II Gayungan Surabaya. Orangtua peserta didik ini mengaku bahwa anaknya beberapa kali dipindahkan dari satu sekolah kesekolah lain, mulai dari sekolah swasta hingga negeri di Surabaya hingga Sidoarjo. Namun karena tidak ada perubahan berarti mereka kembali memindahkan anak mereka ke SD Negeri Gayungan II.

Manajemen sarana prasarana dalam pendidikan yang mengelola mengenai segala sesuatu fasilitas yang diperlukan oleh peserta didik dalam menjalankan pembelajaran disekolah. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana terdiri dari 4 fungsi antara lain *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*. SD Negeri Gayungan II Surabaya dalam pengelolaan sarana dan prasarana dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang dibantu seorang koordinator sarana dan prasarana. Kegiatan manajemen sarana dan prasarana di SD Gayungan II akan dibahas dengan 3 sub pembahasan, antara lain perencanaan sarana dan prasarana, pengadaan saran dan prasarana dan penghapusan sarana dan prasarana.

METODE

Pendekatan digunakan sebagai alat mencapai tujuan penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Permasalahan yang harus dikupas secara mendalam membutuhkan pendekatan wawancara, observasi dan studi dokumen. Sejalan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, maka rancangan pendekatan kualitatif yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti ialah metode studi kasus. Dalam penelitian dilakukan uji kebasahan data dengan validitas konstruk, validitas internal, validitas eksternal, dan keandalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mengacu pada teknik pengumpulan data yang dilakukan, maka hasil penelitian didasarkan pada wawancara, observasi dan studi dokumentasi untuk mengetahui kondisi implementasi manajemen sarana dan prasarana di SD Negeri Gayungan II/423 Surabaya. Berikut hasil penelitian yang didapat:

1. Perencanaan manajemen sarana dan prasarana yang dilaksanakan SD Negeri Gayungan II Surabaya

Kolaborasi peserta sehingga menambah aktor yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan supaya dapat mencapai tujuan bersama dipandang penting dilakukan oleh sekolah (Margerum & Parker, 2019, p. 2). SD Negeri Gayungan II Surabaya dalam melaksanakan perencanaan sarana prasarana sekolah, memberikan tugas tambahan salah satu guru untuk menjadi koordinator manajemen sarana dan prasarana yang membantu tugas kepala sekolah dalam melaksanakan manajemen sarana dan prasarana untuk menghimpun data dari seluruh warga sekolah. Sedangkan masyarakat yang dilibatkan diwakili oleh komite sekolah.

Ibrahim Bafadal (2004) dalam (Ananda & Banurea, 2017, p. 30) menegaskan perlu adanya proses analisis dalam manajemen sarana dan prasarana supaya menjadikan proses perencanaan berbasis prosedur yang sistematis bukan hanya praduga semata. Analisis kebutuhan SDN Gayungan II Surabaya dihimpun dari seluruh pengguna sarana prasarana dimana mereka mengetahui inti dari permasalahan yang mungkin muncul antara keadaan ideal dengan keadaan yang sedang terjadi.

Rapat SDN Gayungan II Surabaya dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yaitu bulan Januari yang dihadiri oleh seluruh pendidik SDN Gayungan II Surabaya termasuk didalamnya terdapat para koordinator standar nasional pendidikan SDN Gayungan II, kepala sekolah dan juga komite sebagai *stake holder* disekolah.

Penyusunan RKAS berdasarkan analisis prioritas 5 tim koordinator dan *stake holder* lainnya dituliskan dalam RKAS selama satu tahun anggaran. Pada juknis penggunaan dana BOS (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021) RKAS menjadi dokumen wajib dalam penggunaan dana BOS yang di sahkan oleh kepala dinas.

2. Implementasi manajemen sarana dan prasarana SD Negeri Gayungan II Surabaya

Pengorganisasian dalam artikel (Khikmah, 2020, p. 126) menekankan bahwa pengorganisasian merupakan ikatan antar individu yang mampu bekerjasama menghasilkan hasil kerja yang sesuai dengan keadaan dan tujuan organisasi. SDN Gayungan II Surabaya dalam melaksanakan inventarisasi

dilaksanakan oleh guru kelas yang tidak tergabung dalam tim koordinator manajemen sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan manajemen sarana prasarana, koordinator tidak membagi tugas secara detail kepada anggota tim, dimana seluruh kegiatan manajemen sarana prasarana dilaksanakan bersama. Kemudian inventarisasi tidak dapat dilaksanakan oleh tim maka tim menunjuk seorang pendidik untuk membantunya melaksanakan inventarisasi.

Pengadaan sarana dan prasarana sekolah menurut Taylor (2011) dalam (Nasrudin & Masryadi, 2019, p. 19) bersumber dari pendanaan oleh pemerintah maupun swasta yang terlibat dengan sekolah. pemenuhan kebutuhan manajemen sarana dan prasarana tidak hanya bersumber pada BOS melainkan juga mendapat bantuan BOPDA dan wali murid.

Terdapat dua kegiatan pokok manajemen sarana dan prasarana dalam kegiatan RKAS SD Negeri Gayungan II Surabaya tahun 2021. Pertama, pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan merupakan kegiatan merawat, memelihara dan menyimpan agar barang awet (Fatmawati, Mapinccara, & Habibah, 2019, p. 118). Pada pemeliharaan sarana dan prasarana di SD Negeri Gayungan II Surabaya banyak pembelian barang penunjang kebersihan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Kedua, pengadaan sarana dan prasarana dimana pengadaan sarpras tahun anggaran 2021 SD Negeri Gayungan II memprioritaskan pengadaan sarana dan prasarana memprioritaskan pengadaan sarana dan prasarana dengan membeli CCTV, papan nama, blender dan pigura. Pengadaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan sekolah demi menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang dilaksanakan Barnawi dan Arifin dalam (Ananda & Banurea, 2017, p. 39).

SD Negeri Gayungan II Surabaya belum membuat kode pada barang inventaris yang dimiliki sekolah. Ibrahim Bafadal menjelaskan kegiatan inventarisasi merupakan pencatatan, pemberian kode dan serta pembuatan laporan (Huda, 2020, p. 27). Nuralina dan Nellihartati menambahkan bahwa inventarisasi merupakan kegiatan mencatat barang milik negara sesuai pedoman (Nuralina & Nelliraharti, 2020, p. 24). Menurut Kompri (2014) dalam (Nasrudin & Masryadi, 2019, p. 20) kegiatan inventarisasi memiliki 2 tujuan. Tujuan pertama untuk mencatat seluruh barang yang diadakan. Tujuan

selanjutnya yakni pembuatan kode atau kodifikasi.

3. Evaluasi manajemen sarana dan prasarana SD Negeri Gayungan II Surabaya

Dana perbaikan AC untuk ruang inklusi oleh wali murid SDN Gayungan II Surabaya dengan galang dana sumbangan walimurid peserta didik inklusi. Meskipun terdapat dana untuk pengadaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana sebenarnya dapat dianggarkan baik melalui BOS maupun BOPDA. Keterlibatan orang tua dalam memaksimalkan dukungan bagi pembelajaran disekolah bagi peserta didik sesuai (Septiana et al., 2018, p. 300) dimana dalam artikel menjelaskan bahwa dukungan fisik maupun materi dapat membantu sekolah menyelenggarakan pelayanan yang maksimal. Peraturan Menteri Pendidikan No.75 Pasal 10 mengenai komite sekolah juga turut merestui keterlibatan walimurid menggalang dana guna mendukung sarana dan prasarana sekolah. Penggalangan dana oleh walimurid SD Negeri Gayungan II untuk membantu secara finansial memperbaiki AC ruang inklusi yang mengalami kerusakan.

Evaluasi dan pelaporan BOS SDN Gayungan II Surabaya dilaksanakan setiap 4 bulan sekali dengan mengetahui ketua komite. Evaluasi di SDN Gayungan II Surabaya dilaksanakan untuk mengetahui apakah poin yang direncanakan terpenuhi atau tidak. Evaluasi berarti sama dengan pengawasan menurut Yaqin dan Syafi'i (Yaqin & Syafi'i, 2020, p. 41) dimana bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat guna mencapai tujuan organisasi. Evaluasi juga berarti pengawasan yang berfungsi menetapkan apakah suatu tujuan yang telah dirumuskan organisasi tercapai atau sebaliknya, bagaimana organisasi megupayakan tercapainya tujuan dengan kegiatan yang dilaksanakan kemudian diambil langkah selanjutnya untuk menyesuaikan kegiatan yang mungkin tidak sesuai dengan perencanaan agar organisasi mampu mencapai tujuan (Ya'cub & Ga'a, 2021, p. 64). Meriza dalam artikelnya berpendapat bahwasanya evaluasi berarti mencegah kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh organisasi (Meriza, 2018, pp. 38–39). (1) SDN Gayungan II Surabaya mematok keberhasilan berdasarkan poin ketercapaian perencanaan sarana prasarana (2) mengamati kegiatan pelaksanaan sarana dan prasarana, kegiatan mengamati dilaksanakan sepanjang tahun oleh seluruh warga sekolah

SDN Gayungan II Surabaya (3) mengkomparasikan antara patokan yang telah disusun dengan apa yang terjadi. Musyawarah mengenai yang terjadi dengan perencanaan menjadi kegiatan yang dilaksanakan dalam evaluasi sarana prasarana di SDN Gayungan II Surabaya (4) Langkah kunci dalam pengawasan adalah pengambilan keputusan untuk tindakan selanjutnya bagaimana organisasi harus berjalan setelah pengawasan baik itu peningkatan atau perbaikan atas penyimpangan yang akan terjadi maupun telah terjadi. Juga tindak lanjut dalam memperbaiki kesenjangan diawasi oleh kepala sekolah SDN Gayungan II Surabaya.

SDN Gayungan II Surabaya melakukan revisi anggaran 2021 pada sarana dan prasarana. Revisi anggaran dana BOS diperkenankan dilaksanakan oleh sekolah apabila memang dibutuhkan perubahan pada perencanaan (Rahayu et al., 2019, p. 20). Pelaksanaan revisi anggaran diperbolehkan pada saat perencanaan triwulan selanjutnya akan diusulkan atau satu bulan sebelum triwulan selanjutnya dijalankan (Bakti, 2020, p. 84). Kebijakan baru Kementerian Pendidikan berakitan dengan penghapusan ujian nasional dan diganti dengan asesmen nasional berbasis komputer mempengaruhi perencanaan tahun anggaran 2021 SDN Gayungan II Surabaya. Asesmen nasional berbasis komputer baru disosialisasikan awal tahun 2021 bertepatan dengan perencanaan anggaran dana BOS. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar pelaksanaan ANBK sebagai bagian dari evaluasi pendidikan yang digagas oleh pemerintah dapat diikuti oleh SDN Gayungan II Surabaya.

PENUTUP

Simpulan

1. Perencanaan sarana dan prasarana sekolah inklusi di SD Negeri Gayungan II Surabaya dilaksanakan dengan kaidah kaidah manajemen dan peraturan perundang – undangan yang ada, dimana perencanaan diawali dengan analisis kebutuhan yang dihimpun dari koordinator yang tersusun sesuai standar nasional pendidikan. Perumusan rencana melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal yang membuat perencanaan SD Negeri Gayungan II Surabaya komprehensif untuk mencapai manajemen sarana dan prasarana sekolah inklusi yang efektif dan efisien.

2. Implementasi sarana dan prasarana SD Negeri Gayungan II Surabaya dalam melaksanakan pembagian tugas, tanggungjawab sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sumberdaya manusia yang sesuai, dana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berasal dari dana BOS, BOPDA serta sumbangan komite. Pada pengendalian atau inventarisasi sarana dan prasarana di SDN Gayungan II Surabaya tidak melaksanakan pengkodean atau kodifikasi pada masing – masing sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana belum pernah dilaksanakan di SD Negeri Gayungan sehingga sarana prasarana yang tidak dapat dipakai karena rusak berat dan tidak dapat diperbaiki disimpan didalam gudang. Implementasi sarana dan prasarana SD Negeri Gayungan II Surabaya dapat dikatakan telah diselenggarakan sesuai dengan perencanaan pada awal tahun anggaran, akan tetapi kurang berjalan secara efektif dan efisien.

3. Evaluasi manajemen sarana dan prasarana yang dilaksanakan SD Negeri Gayungan II melibatkan pihak internal maupun eksternal yang dilaksanakan secara berkala yakni 4 bulan sekali. Evaluasi yang dilaksanakan belum diterapkan sebagai perbaikan dalam perencanaan manajemen sarana dan prasarana di sekolah tahun sebelumnya karena informasi perencanaan dihimpun dari kebutuhan koordinator standar nasional pendidikan.

Saran

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya

a. Kepala dinas pendidikan Kota Surabaya meningkatkan kontrol kualitas manajemen sarana dan prasarana secara keseluruhan dan detail. Tidak hanya ketepatan pencairan dana BOS dan pertanggungjawaban sekolah mengenai pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tetapi juga memperhatikan bagaimana memelihara, menyimpan, menggunakan, memperbaiki dan mengawasi sekolah dalam implementasi manajemen sarana dan prasarana.

b. Kepala dinas pendidikan memberikan pelatihan berkala

mengenai manajemen sarana dan prasarana agar sekolah mampu mengembangkan sarana dan prasarana disekolah, misalnya pelatihan sistem informasi sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan aplikasi SIAGUS.

2. Kepala Sekolah SD Negeri Gayungan II Surabaya

a. Kepala sekolah diharapkan mampu mempertahankan kualitas SDN Gayungan II Surabaya sebagai sekolah inklusif yang berkualitas dengan mengembangkan sekolah untuk memiliki penghasilan supaya dapat maksimal dalam pendanaan pelayanan sekolah bagi peserta didik dan masyarakat.

b. Kepala sekolah diharap mampu meningkatkan kualitas manajerial dengan supervisi untuk pengendalian sarana dan prasarana yang dikelola sekolah supaya sarana dan prasarana dapat awet dan terpelihara dengan baik supaya dapat digunakan kapanpun saat dibutuhkan.

c. Kepala sekolah diharapkan melaksanakan *reshuffle* guna peningkatan pendayagunaan sumberdaya manusia apabila diperlukan.

3. Koordinator Manajemen Sarana Dan Prasarana

a. Koordinator sarana dan prasarana diharapkan mengumpulkan data dan mengarsipkan data mengenai sarana dan prasarana secara berkala sehingga mengetahui pemetaan sarana dan prasarana di SD Negeri Gayungan II secara akurat dengan mengawasi pendistribusian, penggunaan, inventarisasi, pemeliharaan, perbaikan, penyimpanan maupun penghapusan sarana dan prasarana.

b. Koordinator manajemen sarana dan prasarana diharapkan terus mengembangkan manajemen sarana dan prasarana dengan koordinasi dan kerjasama internal tim maupun eksternal secara berkala dengan rapat internal tim maupun dengan pihak terkait.

4. Ketua Komite Sekolah Dasar Negeri II Gayungan Surabaya

a. Ketua komite diharapkan meningkatkan keikutsertaan dalam

kegiatan manajemen sarana dan prasarana sekolah dengan aktif memberikan dukungan baik ide ataupun materi supaya pelayanan bagi peserta didik menjadi maksimal.

b. Ketua komite diharapkan ikut mengawasi berjalanya manajemen sarana dan prasarana sebagai wakil masyarakat dan walimurid SDN Gayungan II Surabaya.

5. Peneliti Lain

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperdalam dan mengembangkan fokus penelitian mengenai (1) Penginventarisasi sarana dan prasarana sekolah sesuai standar inventarisasi (2) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana sekolah yang efektif dan efisien. (3) Sistem informasi manajemen inventarisasi yang terintegrasi dengan SIAGUS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackah-jnr, F. R., & Danso, J. B. (2018). Examining The Physical Environment of Ghanaian Inclusive Schools. *Journal of Inclusive Education*, 23(4), 1–22. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1427808>
- Akyuni, Q. (2018). Pengorganisasian Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Pemikiran, Riset Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 10(2), 91–102. Retrieved from <https://scholar.google.co.id>
- Ananda, R., & Banurea, O. K. (2017). *Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. (S. Saleh, Ed.). Medan: CV. Widya Puspita.
- Awaluddin, & Hendra. (2018). Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Dinggala, 2(1), 1–12. Retrieved from www.jurnal.untad.ac.id
- Bakti, S. (2020). Efektivitas Pendayagunaan Biaya Bantuan Operasional Sekolah Dalam Anggaran Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Swasta dan Negeri. *Jurnal EduTech*, 6(1), 78. Retrieved from <https://jurnal.umsu.ac.id>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., Dicenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The Use of Triangulation in Qualitative Research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). (2006). Retrieved from <http://www.un.org/esa/socdew/enable/rights/convtexte.htm>
- Corbet, J., & Redding, S. (2017). Using Needs Assessment for School and District Improvement. United State of America. Retrieved from <https://www.adi.org>
- Culccio, C., & Husby-Slater, M. (2018). *Needs Assessment Guidebook*. Washington: U.S Departement of Education. Retrieved from <https://oese.e.gov>
- Desiningrum, D. R. (2017). *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus* (2nd ed.). Yogyakarta: psikosain.
- Ellong, T. D. A. (2018). Manajemen Sarana dan Prasarana di Lemabaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Iqra'*, 11(1), 1–8. Retrieved from <https://journal.iain-manado.ac.id/>
- Fathurochman, I., Siswanto, Anggraeni, R., & Kumar, K. S. (2021). Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Menunjang Mutu Pembelajaran di SDN Lubuk Tua Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, XIII(1), 65–75. Retrieved from <https://www.google.scholar/>
- Fatmawati, N., Mapinccara, A., & Habibah, S. (2019). Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran*, 3(2), 115–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/pembelajar.v3i2.9799>
- Huda, M. N. (2020). Inventarisasi dan Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2), 25–44. Retrieved from <https://e-journal.stail.ac.id>
- Hyett, N., Kenny, A., & Dickson-swift, V. (2014). Methodology or method? A critical review of qualitative case study report. *Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 9, 1–12. <https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23606>
- Indonesia, K. P. P. N. R. (n.d.). Sekilas SDG'Indonesia, K. P. P. N. R. (n.d.). Sekilas SDG's. Retrieved from <https://www.sdgs.bappenas.go.id>
- Kemntrian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Data dan Informasi - Profl Kesehatan Indonesia 2017*. Retrieved

- from <https://pusdatin.kemendes.go.id>
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara, Pub. L. No. 96/PMK.06, 28 (2007). Indonesia: Peraturan Menteri Keuangan. Retrieved from <http://peraturanbpk.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (2009). Indonesia. Retrieved from <https://jdih.kemendikbud.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Komite Sekolah (2016). Indonesia. Retrieved from <https://luk.ugm.ac.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Juknis Pengelolaan Dana BOS, Pub. L. No. 6 (2021).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021, Pub. L. No. 5 (2021). Indonesia.
- Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 123–130. Retrieved from <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp>
- Khosarani, S. T., & Almasifard, M. (2017). Evolution of Management Theory within 20 Century: A systemic Overview of Paradigm Shifts in Management. *International Review of Management and Marketing*, 7(3), 134–137. Retrieved from www.econjournals.com
- Margerum, R. D., & Parker, R. (2019). Evaluating Networks for Collaborative Planning and Management. *Journal of Planning Education and Research*, 1(11), 1–11. <https://doi.org/10.1177/0739456X19889387journals.sagepub.com/home/jpe>
- Meriza, I. (2018). Pengawasan (Controlling) Dalam Institusi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 37–46. Retrieved from <https://www.jurnal.staindirundeng.ac.id>
- Mustachoro, A. (2019). *Manajemen Program Sistem Kredit Semester (SKS) di SMA Negeri 3 Sidoarjo*. Universitas Negeri Surabaya.
- Nasrudin, & Masryadi. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Dalam Pembelajaran SD. *Manajemen Pendidikan*, 13(2), 15–23. Retrieved from <https://google.scholar.co.id>
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku. *Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id>
- Nurmalasari, I., & Syah, M. (2019). Peran Staffing Dalam Pemberdayaan Sekolah di SMP Muslimin 5 Kota Bandung. *Jurnal Kependidikan Islam*, 9(1), 97–108. Retrieved from <https://scholar.google.co.id>
- Nurmalina, & Nelliraharti. (2020). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah. *Journal Of Education Science*, 6(1), 21–27. Retrieved from <https://www.scholar.com>
- Peraturan Walikota Surabaya. Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (2021).
- Pitaloka, A. A. P., Fakhiratunnisa, S. A., & Ningrum, T. K. (2022). Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Sains*, 2(1), 27–42. Retrieved from <https://ejournal.yasin-alsys.org>
- Pusvitasari, R., & Sukur, M. (2020). Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi Kasus di SD Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo). *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 94–106. Retrieved from <https://www.download.garuda.kemdikbud.go.id>
- Rahayu, S., Mukhzarudfa, Yuliusman, & Yuliana. (2019). Praktik Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(1), 15–23. Retrieved from <https://www.online-journal.unja.ac.id>
- Rahman, M. A., & Awaluddin, M. (2020). *Dasar Dasar Manajemen (Buku Bahan Ujian Komprehensif)*. (R. D. A. Parmitasari, Ed.) (1st ed.). Sulawesi Selatan. Retrieved from <https://scholar.google.co.id>
- Savira, S. I., Wagino, & Laksmiwati, H. (2019). Apa yang berbeda? kemampuan kognitif pada anak tunanetra tanpa pengalaman visual (congenital visual impairment).

- Jurnal Pendidikan Inklusi*, 3(1), 020–039.
Retrieved from <https://jurnal.unesa.ac.id>
- Septiana, D. N., Bafadal, I., & Kusumaningrum, D. E. (2018). Pelibatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 1(3), 293–301.
Retrieved from <https://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/>
- Sharah, A. (2020). *Studi Indigenous dengan Metode Kualitatif* (1st ed.). Yogyakarta: PT. Gramasurya.
- Surabaya, D. W. (2017). *Pendataan ABK Tahap II: DWP Kota Surabaya Gagasan BLK untuk ABK*. Surabaya. Retrieved from <https://dharmawanita.surabaya.go.id>
- The Salamaca Statement and Framework For Action On Special Needs Education. (1994). In *World Conference*. Salamanca: UNESCO. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org>
- Ya'cub, M., & Ga'a, D. suwanti. (2021). Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 60–69. Retrieved from <https://www.pasca.jurnalikhac.ac.id>
- Yaqin, A., & Syafi'i, I. (2020). Fungsi Pengawasan Dalam Lembaga Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 Guna Menciptakan Profesionalitas Kerja. *Journal of Islamic Education Management*, 1(2), 38–50. Retrieved from <https://www.jurnal.iainkediri.ac.id>